

**ANALISA YURIDIS MENGENAI *EX AEQUO ET BONO*  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG  
ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**

**TESIS**

**Oleh :**

**ESTHER NAOMI**

**2102190088**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2023**

**ANALISA YURIDIS MENGENAI *EX AEQUO ET BONO*  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG  
ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna  
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada  
Program Studi Magister Hukum Program  
Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

**Oleh :**

**ESTHER NAOMI**

**2102190088**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2023**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA**

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH TESIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Esther Naomi  
NIM : 2102190088  
Program Studi : Magister Hukum  
Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul :

**“ANALISA YURIDIS MENGENAI EX AEQUO ET BONO DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN PENYELESAIAN SENGKETA”**

Adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku, jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas lain, kecuali pada beberapa bagian sumber informasi sudah tercantum menggunakan cara referensi yang sesuai ketentuan.
3. Bukan merupakan karya terjemah dari kumpulan buku atau jurnal acuan, yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Apabila terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 6 Desember 2023



Esther Naomi  
NIM: 2102190088



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

ANALISA YURIDIS MENGENAI EX AEQUO ET BONO DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE  
DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Oleh :

Nama : Esther Naomi  
NIM : 2102190088  
Program Studi : Magister Hukum  
Fakultas : Pascasarjana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 7 Desember 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H.  
NIDN. 0330106505

Pembimbing II

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.  
NIDN. 0327096504

Ketua Program Studi

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.  
NIDN. 0327096504

Direktur

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M. Pd., PA  
NIDN: 0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Pada tanggal 6 Desember 2023 telah diselenggarakan Sidang Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Esther Naomi  
NIM : 2102190088  
Program Studi : Magister Hukum  
Fakultas : Program Pascasarjana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "ANALISA YURIDIS MENGENAI EX AEQUO ET BONO DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN PENYELESAIAN SENGKETA" oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji

Jabatan dalam Tim  
Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H.

Sebagai Ketua

2. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.

Sebagai Anggota

3. Dr. Aartje Tehupeior, S.H., M.H

Sebagai Anggota

Jakarta, 7 Desember 2023



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA

## HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Esther Naomi  
NIM : 2102190088  
Program Studi : Magister Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis Tugas Akhir : Tesis  
Judul : Analisa Yuridis Mengenai Ex Aequo Et Bono  
Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999  
Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa.

Menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir tersebut bukan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan jika saya mengutip dari karya orang lain, maka akan mencantumkannya sebagai referensi sesuai ketentuan;
2. Tugas akhir tersebut adalah **benar** karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan akan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
3. Saya memberikan hak non ekslusif tanpa royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola berbentuk pangkalan data (*database*), mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pencipta/penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelek atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integrasi akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 6 Desember 2023  
Hormat.

A 10,000 Indonesian Rupiah banknote with the text 'REPUBLIC OF INDONESIA', '10000', 'METERAI TEMPAL', and a serial number 'A3896AKX787258481'.

Esther Naomi

## KATA PENGANTAR

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan arahan dari para pembimbing, oleh karena itu ucapan terima kasih yang sangat dalam disampaikan kepada yang terhormat Bapak Dr. Binoto Nadapdap, S.H., M.H selaku Pembimbing 1, dan Ibu Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H, selaku Pembimbing 2, yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis dalam bimbingan dan juga memberikan masukan yang sangat berharga demi terselesaiannya tesis ini.

Demikin juga penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para guru besar, dosen dan staf akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI), yaitu:

1. Bapak Edward Sirait, S.E, Ketua Yayasan Universitas Kristen Indonesia (UKI).
2. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA, Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI).
3. Ibu Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., M.A, Direktur Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI).
4. Ibu Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H, Ketua Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI).
5. Ibu Dr. Aartje Tehupeiori, S.H., M.H selaku dosen penguji dalam sidang tesis.
6. Seluruh Dosen dan Staf Akademis Universitas Kristen Indonesia (UKI), yang tidak penulis sebutkan satu per satu.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, khususnya dalam hal pengumpulan data dan informasi dalam penulisan disertasi ini, yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penelitian ini.

Secara khusus, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua dan adik penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Ibu Renita Girsang, B.A., S.H, selaku Pimpinan Yan Apul & Rekan , Bapak Anton Indradi,S.H., M.H, selaku Kabag Litigasi Yan Apul & Rekan, Armando Simanjuntak,S.H selaku rekan kerja penulis, serta seluruh karyawan Yan Apul & Rekan yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.
3. Seluruh teman-teman Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI) angkatan tahun 2021/2022.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Meskipun demikian, penulis mengharapkan kiranya tesis ini dapat bermanfaat bagi dunia akademis serta praktisi di bidang arbitrase.

Jakarta, 7 Desember 2023

Penulis

Nama : Esther Naomi

NIM : 2102190088



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH TESIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG MASALAH .....	2
B. RUMUSAN MASALAH.....	9
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN .....	9
D. KERANGKA TEORI DANKERANGKA KONSEPTUAL.....	10
1. Kerangka Teori .....	10
2. Kerangka Konseptual.....	16
E. METODE PENELITIAN.....	19
1. Jenis Penelitian. ....	19
2. Pendekatan Penelitian .....	19
3. Jenis Sumber Data. ....	20
4. Teknis Pengumpulan Data.....	21
5. Teknis Analisa Data.....	21
F. ORISINALISASI PENELITIAN.....	22
G. SISTEMATIKA PENELITIAN .....	23
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>27</b>
A. ARBITRASE .....	27
B. ASAS-ASAS ABRITRASE.....	42

C. <i>EX AEQUO ET BONO</i> .....	43
<b>BAB III : PENGATURAN <i>EX AEQUO ET BONO</i> DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999.....</b>	<b>47</b>
A. RANGKAIAN PROSES ARBITRASE .....	47
1. Klausul Arbitrase .....	40
2. Pemilihan Arbitrtase .....	55
3. Pengajuan Permohonan Arbitrase.....	58
4. Tanggapan Termohon .....	59
5. Tuntutan Balik. ....	60
6. Jawaban Tuntutan Balik.....	61
7. Sidang Pemeriksaan Arbitrase .....	61
8. Biaya-biaya .....	65
9. Putusan Arbitrase .....	70
B. <i>EX AEQUO ET BONO</i> DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999.....	70
<b>BAB IV: ARBITER MEMUTUS BERLANDASKAN ASAS <i>EX AEQUO ET BONO</i> TANPA ADANYA KESEPAKATAN ANTAR PARA PIHAK .....</b>	<b>75</b>
A. ARBITRASE .....	75
1. Pengertian Arbitrase .....	75
2. Persyaratan Arbitrtase.....	75
3. Pengangkatan Arbitrase .....	76
4. Tugas dan Larangan Arbiter .....	79
5. Hak Ingkar dan Tuntutan Ingkar.....	80
6. Alasan Diajukan Hak Ingkar.....	84
7. Pengajuan Hak Ingkar.....	85
8. Penugasan Arbiter Harus Diajukan Secara Tertulis.....	86
9. Tanggung Jawab Hukum Arbiter.....	87
10. Berakhirnya Tugas Arbiter .....	89

B. HAK PARA PIHAK DALAM ARBITRASE.....	91
C. PUTUSAN ARBITRASE.....	93
D. PUTUSAN ARBITRASE BERLANDASKAN ASAS <i>EX AEQUO ET BONO</i> .....	94
E. SIFAT PUTUSAN ARBITRASE.....	99
1. Putusan Yang Bersifat Deklatoir .....	99
2. Putusan Yang Bersifat Konstitutif.....	99
3. Putusan Yang Bersifat Condemnatoir.....	99
F. SISTEM PENGAMBILAN PUTUSAN ARBITRASE .....	100
1. Sistem Musyawarah.....	100
2. Sistem Mayoritas .....	101
3. Sistem Perwasitan .....	102
4. Kombinasi Antara Mayoritas dan Perwasitan.....	103
G. KEKUATAN HUKUM PUTUSAN ARBITRASE. ....	104
H. PUTUSAN ABITRASE TIDAK BOLEH DIPUBLIKASI.....	106
I. PERMOHONAN KOREKSI TERHADAP PUTUSAN ARBITRASE .....	108
J. PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE .....	110
K. PUTUSAN ARBITRASE TIDAK DAPAT DIEKSEKUSI.....	112
1. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.....	112
2. Berdasarkan <i>Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention)</i> .....	113
3. Berdasarkan UNCITRAL <i>Arbitration Model Law</i> .....	116
L. PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE.....	119
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>122</b>
A. KESIMPULAN .....	122
B. SARAN .....	123
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>125</b>

## **ABTRAK**

Judul Penelitian : Analisa Yuridis Mengenai *Ex Aequo Et Bono* Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Kata Kunci : Analisa Yuridis, Arbitrase, *Ex Aequo Et Bono*

Ringkasan Isi:

Pada perkembangan hukum arbitrase modern, salah satu doktrin hukum yang diadopsi adalah apa yang dikenal dengan arbitrase *ex aequo et bono*. Hal ini tercantum dalam Pasal 56 ayat (1) UU APS. Keadaan atau hal tertentu yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ini sangatlah membuat bias bagi para pihak yang menyelesaikan sengketa bisnis melalui jalur penyelesaian arbitrase. Bahkan dalam arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan ini pun akan besar kemungkinan terjadinya praktik penyelewengan kekuasaan. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan menguraikan *Ex Aequo Et Bono* di dalam putusan arbitrase serta mengkaji tindakan yang dapat dilakukan oleh para pihak jika arbiter memutus berdasarkan *Ex Aequo Et Bono* namun tidak disepakati oleh para pihak. Penelitian ini didasarkan pada suatu penelitian hukum normative, yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Atau penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Kesimpulan dari penelitian ini adalah para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*), dalam hal arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Serta jika arbiter memutus berdasarkan *Ex Aequo Et Bono* namun tidak disepakati para pihak, maka para pihak dapat mengajukan pembatalan putusan arbitrase.

## ABSTRACT

- Title : Analisa Yuridis Mengenai *Ex Aequo Et Bono* Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Key Word : Analisa Yuridis, Arbitrase, *Ex Aequo Et Bono*

In the development of modern arbitration law, one of the legal doctrines adopted is what is known as *ex aequo et bono* arbitration. This is stated in article 56 paragraph (1) of the APS Law. Certain conditions or matters referred to in Article 56 of Law no. 30 of 1999 is very biased towards parties who resolve business disputes through arbitration. Even if arbitrators are given the freedom to give decisions based on justice and propriety, there is a high possibility of abuse of power. Based on the problems that have been raised, the aim of this research is to analyze and describe *Ex Aequo Et Bono* in arbitration decisions and examine the actions that can be taken by the parties if the arbitrator decides based on *Ex Aequo Et Bono* but is not agreed upon by the parties. This research is based in normative legal research, which examines laws that are conceptualized as norms or rules that apply in society, and become a reference for everyone's behavior. Or research carried out by examining library materials or secondary data alone. The conclusion of this research is that the parties can enter into an agreement to determine that the arbitrator in deciding the case must be based on legal provisions or in accordance with a sense of justice and propriety (*ex aequo et bono*), in the event that the arbitrator is given the freedom to give a decision based on justice and propriety then statutory regulations can be set aside. And if the arbitrator decides based on *Ex Aequo Et Bono* but is not agreed upon by the parties, then the parties can apply for cancellation of the arbitration decision.